

Jangan Jadi Rentenir Politik

PR, 4/4/08

V/42

Oleh ASEP SUMARYANA



RENTENIR memang dibenci, namun dicari. Ketika orang terpojok karena keceknya cekak, pilihan yang paling mudah ya meminta bantuan rentenir. Namun, kemudahan meminjam uang berbuntut maut. Bisa-bisa rumah melayang. Oleh karena itu, agama melarang praktik semacam itu dan haram hukumnya.

Dalam ajang Pilgub Jabar 2008, bisa jadi ada juga praktik semacam rentenir. Dengan mengobral uang menagih kekuasaan untuk kemudian memungut uang berlipat ganda.

Keduanya bisa jempot bola untuk menyerahkan uang. Hanya, bedanya, rentenir berstatus sosial negatif, sedangkan menjadi gubernur terhormat.

Sebelum masa kampanye berlangsung, berbagai upaya "nyodok" dilakukan dengan kedok silaturahmi untuk *approach* kepada pemuka rakyat. Tidak jarang, mereka merangkul atau cium tangan untuk menunjukkan kedekatan dan ketakziman. Tentu saja cenderung mata dalam bentuk angpau, kalender, dan kaus berfoto dirinya menjadi bingkisan yang menyertainya. Janji muluk untuk membangun fasilitas apa pun diumbarnya untuk menarik simpati yang bisa menjerat rakyat.

**

JANJI yang meluncur dari para calon gubernur bisa dipandanginya gombal oleh rakyat. Bisa saja disamakan dengan rentenir yang pandai memelintir dan mencekiknya di kemudian hari. Padahal, yang menjadi harapan rakyat adalah pemimpin yang memiliki investasi sosial. Datang kepada rakyat bukan untuk menukarkan uang dengan kekuasaan. Namun, ikhlas untuk menolong. *Nulung kanu butuh, nalang kanu susah.*

Bantuan sosial bagi biaya sekolah anak miskin, atau usaha kecil serta penyantunan bagi golekmah (golongan ekonomi lemah) dan anak telantar masih menjadi pemandangan langka. Padahal, dengan gerakan *propoor* seperti itu, rakyat akan kenal dan mengenang figur penolongnya.

Tokoh yang berkorban demi rakyat, merupakan figur yang perlu terus dimunculkan untuk menggantikan tokoh yang berkorban demi karier politiknya. Yang disebutkan belakangan tentulah dapat sama dengan rentenir. Tidak ada amalan di sana, apalagi keikhlasan.

Jika ada sekitar 30% rakyat miskin di suatu daerah, setidaknya sejumlah itulah yang mengenal dan mengharapkan selalu dekat dengan tokoh saleh itu. Namun, ketika tidak ada tokoh seperti itu, kalkulasi ekonomis sering jadi pilihan terbaik. Uang diterima, *milih kumaha engke*. Ketika masih banyak yang berpikiran seperti ini, dipastikan bahwa calon tidak dikenal apalagi berada dalam hati rakyatnya.

Investor sosial merupakan harapan yang diinginkan rakyat. Figur ini menempatkan rakyat sebagai mitra dan anutan. Tidak untuk dikelabui dan disakiti hatinya. Oleh karena itu, ketika amanah itu ada ditangannya, kerja keras untuk mewujudkan daerah yang *baladun thoyyibbatun warabbun ghafur* akan menjadi obsesinya.

Dengan tekad ini, orientasi *jang ku imah* akan dikubur dalam-dalam. Uang yang diberikan kepada rakyat sejak lama, didasarkan oleh perintah agama, bukan seperti perilaku rentenir yang harus kembali dalam jumlah berlipat ganda.

Jadi, biarkanlah rakyat memilih dengan nurani mereka.***

Penulis, dosen Jurusan Administrasi Negara FISIP dan Sekretaris LP3AN Unpad.